

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. 2018. Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pengembangan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan).
- Akbar, B. 2012. Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. Artikel. *Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center*. Hal 1-2.
- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (On-Line), tersedia di: <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> (25 Januari 2021).
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu et, al. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Artikel Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Eniversitas Jember (UNEJ).
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Makassar.
- Faridah & Suryono Bambang. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ilmu & Akuntansi*, Vol. 4, No. 5.
- Haryanto, Sahmuudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hermansyah. 2015. Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). *E-Jurnal pemerintahan integrative*.
- Husein Umar. 2010. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h.130.
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (add) di Kecamatan Dolo Seltan Kabupaten Sigi. *E-Journal Katalogis*.
- Ismail, M., A. K. Widagdo, dan A. Widodo. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol. 2, No. 1, Hal. 2-4.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Passaribu. F.J. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD dan Akseibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD. *Tesis*. Medan. Program. Program Pasca Sarjana Univ. Semarang Utara. Profesi *Berdasarkan Locus Of Control dan Gender*. Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, pasal 2.*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- Putri, R. A. 2018 Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (*Doctoral Dissertation*). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Rahadian, Achmad Hidayat. 2010. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah STIAMI*.
- Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 4.
- Romney, Marshal B, Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi (ed XIII)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi Berdasarkan Locus Of Control dan Gender. *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*. Surabaya.
- Septiani. A. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang. *Tesis*. Perspektif Teori Kepatuhan. Hal. 13-14.

- Simanggung, F. dan S. Wicaksono. 2017. Evaluation of Village Fund Management in Yapen Island Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Science*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Penekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharmi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, Azhar. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Tampubolon, Richardo Juniaster. 2014. Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013. Dipublikasikan. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.
- Taufik. T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Tomuka. S. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli). *Ejournal Unsrat*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1.
- Wida. S. A. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yenni. 2013. Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan publik di Kantor Camat samarinda Utara Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*.
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus: Desain dan Metode cet-13*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yuniati, Umi. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Tesis*. Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Taufik Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Baera, 11 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Dusun Baera, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu
Kabupaten Barru
Telepon Rumah/HP : 082153326957
Alamat *E-mail* : taufik979.th@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2010 : SD INPRES BAERA
2. Tahun 2010-2013 : SMP NEGERI 3 BALUSU
3. Tahun 2013-2016 : SMA NEGERI 1 BARRU

Pengalaman

1. Organisasi
Tahun 2015: Anggota Karang Taruna Desa Kamiri
2. Kerja/Magang
Tahun 2020: JNE Cabang Barru

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 13 Oktober 2021

Taufik Hidayat

Lampiran 2: Daftar Narasumber

Daftar Narasumber di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru

No	Nama Narasumber	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Hj. Nurhaedah, S.Pd. I	Perempuan	Sekretaris Desa
2	Muchtar	Laki-laki	Kaur Keuangan
3	Suwarni Jawanti	Perempuan	Ketua BPD
4	Irwin	Laki-laki	Tokoh Masyarakat

Lampiran 3: Daftar Jawaban Wawancara

Informan 1: Sekretaris Desa

Informan 2: Kaur Keuangan

Informan 3: Ketuan BPD

Informan 4: Tokoh Masyarakat

Wawancara dengan Sekretaris Desa dengan Kaur Keuangan

Peneliti	Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kamiri?
Informan 1	Perencanaan dimulai dengan cara mengumpulkan semua yang terlibat dalam proses perencanaan terutama masyarakat, mengadakan musyawarah, mengadakan rapat terkait hasil musyawarah dengan di didasari RPJM Desa dan dibentuknya tim penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), setelah RKPDes disusun, kemudian hasil keputusan disampaikan dalam forum
Informan 2	Perencanaan didasarkan pada tingkat permasalahan di masyarakat, maksudnya ini, apa yang menjadi kebutuhan dalam pembangunan disuatu desa, dengan cara melakukan musyawarah, survey desa, perencanaannya dimulai dari bawah, dari masyarakat, tingkat dusun. dusun ketingkat desa, dengan begitu perencanaan dan pembangunan desa di dasari dalam RPJM, menetapkan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes), jadi otomatis sangat bagus, artinya pemerintah saat ini sangat pro-rakya
Peneliti	Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan APBDesa?
Informan 1	Unsur yang terlibat seperti perangkat desa, BPD, RT, RW serta tokoh masyarakat.
Informan 2	Sebagian besar yang hadir adalah Tokoh masyarakat, BPD, dan tentunya perangkat desa.
Peneliti	Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
Informan 1	Ya pasti kita memilih yang lebih utama kita usulkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.
Informan 2	Dengan melihat yang paling utama dan dengan adanya musyawarah untuk mufakat
Peneliti	Apakah peran SISKEUDES berjalan dengan baik pada tahap pelaksanaan APBDes?
Informan 1	Pelaksanaan aplikasi siskeudes berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan aplikasi itu sendiri, dengan pelaksanaan kegiatan disertai dengan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang di danai

	ADD, seperti adanya penyampaian secara transparansi kepada masyarakat berupa papan informasi. Dana desapun sudah digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas sosial, cuman anggaran ditahun ini khusus untuk penanganan covid-19 berupa BLT
Informan 2	iya sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala namun kami dapat menyelesaikannya, misalnya Ketika saya pribadi ada yang tidak saya tahu, atau ada yang tidak saya mengerti, saya menanyakan kepada rekan saya yang jauh lebih paham, sekedar informasi di daerah memang ada orang yang difokuskan untuk menangani masalah SISKEUDES Ketika terjadi error, menegenai dana dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, saya kira kami memaksimalkan untuk kemajuan desa ini, misalnya kami terbuka untuk para pemuda yang ingin membangun usaha dan mau bekerja sama dengan desa, nanti usaha itu menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) namun dikelola oleh orang-orang yang telah bersepakat dengan pemerintah desa
Peneliti	Apakah ada kendala yang dihadapi dengan penerapan SISKEUDES dan bagaimana pemerintah desa mekasimalkan dana yang disalurkan?
Informan 1	Aplikasi ini sangat membantu kami, dana dana yang disalurkan ke masyarakat tentunya kami salurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Informan 2	Aplikasi SISKEUDES berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala namum kami dapat menyelesaikannya, misalnya Ketika saya pribadi ada yang tidak saya tahu, atau ada yang tidak saya mengerti, saya menanyakan kepada rekan saya yang jauh lebih paham, sekedar informasi di daerah memang ada orang yang difokuskan untuk menangani masalah SISKEUDES Ketika terjadi error, menegenai dana dari pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, saya kira kami memaksimalkan untuk kemajuan desa ini, misalnya kami terbuka untuk para pemuda yang ingin membangun usaha dan mau bekerja sama dengan desa, nanti usaha itu menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) namun dikelola oleh orang-orang yang telah bersepakat dengan pemerintah desa
Peneliti	Bagaimana peran masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa Kamiri?
Informan 1	Tentunya dalam setiap kegiatan pembangunan kami selalu melibatkan masyarakat, karena kebijakan pemerintah desa saat ini adalah dana yang disalurkan ke masyarakat harus dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, misalnya kalau ada pembangunan irigasi maka yang mengerjakan adalah masyarakat lokal sehingga dana yang keluar kembali ke masyarakat.
Informan 2	Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat itu sudah menjadi kebijakan pemerintah desa, karena prinsip kepala desa adalah dari masyarakat untuk masyarakat

Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pelaksanaan SISKEUDES?
Informan 1	Dalam mengawasi SISKEUDES tentunya ada pihak-pihak yang terlibat di dalam hal ini yang terlibat yakni Inspektorat, yang diberi kewenangan oleh BPKP
Informan 2	Sebenarnya, semua pihak ikut terlibat dalam proses pengawasan, termasuk masyarakat secara umum, namun ada pihak tertentu yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan sisikeudes yaitu inspektorat, jadi, pihak inspektorat meminta file import dari komputer operator siskeudes kemudian melakukan pemeriksaan LPJ dan dokumen-dokumen pendukung
Peneliti	Bagaimana mekanisme pelaporan keuangan desa dengan penerapan SISKEUDES?
Informan 1	Dalam proses pelaporan itu dimulai dari surat pengantar, surat perintah pengeluaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja, bukti pencairan (SPP pencairan), pencairan, setelah dicairkan di buat kan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita acara penerimaan barang, pemeriksaan barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun dikerjakan harus ada dokumentasi
Informan 2	Proses pelaporan keuangan desa dalam penerapan aplikasi siskeudes dengan cara menyiapkan saran dan prasarana, karena laporan keuangan ADD yang diperoleh dari siskeudes berupa print out, dari hasil laporan-laporan akan dilaporkan ke pemerintah kabupaten melalui camat.
Peneliti	Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, apakah disampaikan secara transparansi?
Informan 1	Iya disampaikan secara transparan (terbuka), sesuai dengan prinsip akuntabilitas, karena pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang saja, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat desa baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga disebarluaskan melalui papan informasi, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi keuangan desa melalui papan informasi tersebut
Informan 2	Tentunya transparan dikarenakan aplikasi siskeudes ini dapat juga diakses oleh masyarakat, tidak hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat desa juga bisa mengetahuinya, melalui dengan disediakan papan transparansi agar masyarakat tahu pemasukan dan pengeluaran dana desa
Peneliti	Terakhir, apakah Aplikasi SISKEUDES efisien dan efektif dalam mendukung kinerja pemerintah desa?
Informan 1	Penggunaan SISKEUDES bisa dikata sangat efektif dan efisien karena aplikasi ini membantu dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari hulu sampai hilir, artinya apa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dapat dikerjakan dalam satu aplikasi yang dinamakan SISKEUDES, selain itu minimnya kesalahan, mudah dalam hal <i>input</i> , dan hasil <i>output</i> yang memuaskan. Intinya dengan adanya aplikasi ini kami

	sangat merasa terbantu, yang tadinya laporan LPJ dikerjakan kisaran tiga minggu kini bisa selesai dalam satu minggu
Informan 2	Saya rasa aplikasi SISKEUDES sangat efektif karena perannya memang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan aplikasi itu sendiri, dalam segi efisien aplikasi ini juga sangat efisien dilihat dari waktu pengerjaan LPJ biasanya memerlukan waktu beberapa minggu kini dapat selesai dalam seminggu, mudah, tinggal <i>input</i> dan ada <i>output</i> secara otomatis

Wawancara dengan Ketua BPD dan Tokoh masyarakat

Peneliti	Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kamiri?
Informan 3	Perencanaan dimulai dengan musyawarah, dengan melibatkan perangkat desa, BPD, RT, RW, terutama masyarakat, untuk membahas perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan
Informan 4	"Awal perencanaan dimulai dengan menghadirkan musrenbangdes untuk mengadakan pertemuan dengan perangkat desa, BPD, RT, RW, serta masyarakat dalam menyampaikan dan menyampaikan program desa
Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa?
Informan 3	Saya selalu hadir, anggota BPD juga selalu hadir, termasuk tokoh-tokoh masyarakat
Informan 4	Paling banyak yang hadir adalah masyarakat, anggota BPD, dan Pemerintah Desa
Peneliti	Apakah pemerintah desa mengelola dana desa dengan baik?
Informan 3	saya kira pengelolaan keuangan desa terbilang sangat baik, dimana pemerintah desa dapat memaksimalkan dalam memberikan fasilitas yang baik, tidak hanya itu, pemerintah desa sangat berupaya dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat seperti membuka lapangan pekerjaan
Informan 4	Saya kira sudah sangat baik, kami merasakan manfaat dengan adanya dana desa, fasilitas umum dibangun, dan permasalahan-permasalahan sosial bisa diatasi, misalnya jika terjadi bencana alam, dana desa bisa digunakan
Peneliti	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan APBDes?
Informan 3	Setiap kegiatan akan mengikut sertakan masyarakat jika memungkinkan.
Informan 4	Saya melihat jika ada pembangunan fisik, maka Sebagian besar yang mengerjakan bangunan tersebut adalah masyarakat lokal, sehingga kebijakan pemerintah terbilang sangat baik.
Peneliti	Siapa saja yang terlibat dalam mengawasi jalannya SISKEUDES?
Informan 3	Menurut pengetahuan saya, yang melakukan pengawasan jalannya aplikasi siskeudes yaitu inspektorat, namun tidak hanya itu selaku ketua BPD saya sangat jeli terhadap

	pengelolaan Dana yang masuk di desa, saya selalu meminta setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa agar diperlihatkan berita acaranya, berita serah terima, nota pembelian, dan dokumen-dokumen lainnya
Informan 4	Kami juga ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa, jadi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa kami ikut melakukan pengawasan, karena kami menginginkan pemerintah yang bersih
Peneliti	Terkait dengan laporan pertanggungjawaban, apakah disampaikan secara transparansi?
Informan 3	kalau untuk transparansi laporan keuangan dan penggunaan dana desa, sebenarnya desa kamiri sudah cukup transparan dengan laporan yang dihasilkan dari aplikasi siskeudes, yaitu dengan memasang papan informasi seperti di depan kantor desa kamiri, namun saya rasa masih perlu adanya penambahan lagi tempat-tempat strategis agar bisa dijangkau oleh masyarakat
Informan 4	Transparansi keuangan Desa Kimiri sudah sangat baik karena kita bisa mengetahui aktivitas desa kamiri melalui papan informasi yang disediakan di depan kantor desa

Lampiran 4: Dokumentasi wawancara dengan narasumber





